



**LAPORAN KEGIATAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**RESES MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2017-2018**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
2018**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber energi dan mineral. Sumber energi tersebut adalah minyak dan gas bumi serta mineral yang tersebar hampir diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Potensi minyak dan gas terbesar terdapat di Laut Natuna Bagian Barat dan Laut Natuna Bagian Timur wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Potensi blok minyak dan gas tersebut, sebagian besar sudah di tahap produksi, sebagian lagi masih tahap eksploitasi dan eksplorasi.

Namun demikian, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kawasan industri dan perdagangan, sementara ini, di beberapa wilayah masih menghadapi permasalahan berupa keterbatasan sumber energi, baik dalam penyediaan bahan bakar maupun masalah kelistrikan. Selain itu, sebagai salah satu provinsi penghasil minyak dan gas terbesar, Pemerintah Daerah sudah semestinya mendapatkan *Participating Interest* (PI) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara optimal untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2001 bahwa peyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Dengan letak geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini pada beberapa daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan sebagai *pilot project* pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Singapura. Namun demikian, sebagai provinsi yang terus melakukan pengembangan dalam bidang industri serta

letak geografis provinsi Kepulauan Riau yang berada di jalur lalu lintas internasional akan rentan dan berpotensi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terutama pencemaran laut akibat limbah minyak hitam seperti *sludge oil*.

Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Batam, Bintan, Karimun (BBK) yang merupakan kawasan industri dan perdagangan strategis (sebagai *Free Trade Zone*) membutuhkan ketersediaan pasokan energi listrik yang cukup untuk mendukung dan menggerakkan industri dan perdagangan di kawasan tersebut, sehingga penyediaan energi listrik, BBM/LPG dan jaringan gas kota di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai arti yang sangat penting.

Saat ini, PT. PLN (Persero) tidak sepenuhnya dapat menyediakan tenaga listrik terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau pedesaan. Oleh sebab itu, salah satu upaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN, perlu dibangun pembangkit listrik yang bersumber dari potensi energi baru terbarukan yang tersedia dilokasi setempat, seperti Tenaga Air, Tenaga Surya, Tenaga Angin, Panas Bumi, dan lain-lain. Akan tetapi, potensi-potensi tersebut belum dapat dikembangkan dengan maksimal karena berbagai hambatan termasuk kondisi geografis dan anggaran, serta yang utama adalah kebijakan dan dorongan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai obyek kunjungan pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017 – 2018. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi, kegiatan hulu minyak dan gas, dan pencemaran laut akibat limbah minyak.

D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 29 April s/d 3 Mei 2018 dengan tujuan kunjungan ke Provinsi

Kepulauan Riau. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dewan Riset Daerah, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ristek dan Dikti, PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I, PT PLN (Persero), SKK Migas, BPH Migas, KKKS dan perusahaan tambang di Provinsi Kepulauan Riau serta instansi terkait lainnya;
2. Kunjungan dan pertemuan dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan seluruh KKKS di Provinsi Kepulauan Riau terkait kegiatan hulu minyak dan gas dan pencemaran laut oleh limbah minyak hitam seperti *sludge oil* di Provinsi Kepulauan Riau
3. Kunjungan ke TBBM Kijang dan melakukan pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I dan BPH Migas terkait distribusi BBM dan LPG;
4. Kunjungan ke lokasi PLTMG Dompok Tanjungpinang dan melakukan pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) terkait permasalahan ketenagalistrikan dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi dan RUPTL di Provinsi Kepulauan Riau;

E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI

dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir.

DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018 TANGGAL 29 April s/d 3 Mei 2018				
NO.	NAMA	NO. ANGG.	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr. Ir.H.E. HERMAN KHAERON, M.Si	A-419	F.DEMOKRAT	KETUATIM
2.	SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M, M.Sos	A-63	F.PKB	WAKA TIM
3.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	A-170	F-PDIP	ANGGOTA
4.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS	A-134	F-PDIP	ANGGOTA
5.	MERCY CHRIESTY BARENDS, ST	A-228	F-PDIP	ANGGOTA
6.	ADIAN NAPITUPULU	A-156	F-PDIP	ANGGOTA

7.	DRS. KH. NAWAFIE SALEH, SE.MM	A-259	F.GOLKAR	ANGGOTA
8.	IVAN DOLY GULTOM	A-252	F.GOLKAR	ANGGOTA
9.	BAMBANG HARYADI, SE	A-367	F.GERINDRA	ANGGOTA
10.	KARDAYA WARNIKA	A-350	F.GERINDRA	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD NASIR	A-405	F.DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF	A-404	F DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	H. TOTOK DARYANTO, SE	A-489	F-PAN	ANGGOTA
14.	ANDI YULIANI PARIS	A-502	F. PAN	ANGGOTA
15.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	A-83	F.PKB	ANGGOTA
16.	ROFI MUNAWAR, Lc	A-115	F.PKS	ANGGOTA
17.	JOKO PURWANTO	A-515	F-PPP	ANGGOTA
18.	H. AHMAD H.M. ALI, SE	A-32	F. NASDEM	ANGGOTA
19.	MUKHTAR TOMPO, S.Psi	A-560	F.HANURA	ANGGOTA

BAGIAN II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Kunjungan lapangan ke PLTU Tanjung Kasam

Dalam kunjungan lapangan ke PLTU Tanjung Kasam didapat informasi bahwa PLTU Tanjung Kasam dioperasikan oleh PT TJK Power sebagai anak perusahaan PLN Batam (anak perusahaan PT PLN [Persero]) dengan China Huadian Engineering Co.Ltd (CHEC). PLTU Tanjung Kasam merupakan proyek *Independent Power Producer* (IPP) pertama yang menggunakan batubara. Batubara yang digunakan adalah batubara berkalori rendah sekitar 4500 Kcal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan PLTU Tanjung Kasam berjalan seperti yang diharapkan sehingga praktis tidak persoalan teknis yang menjadi kendala operator TJK Power. Berikut adalah profil PLTU Tanjung Kasam:

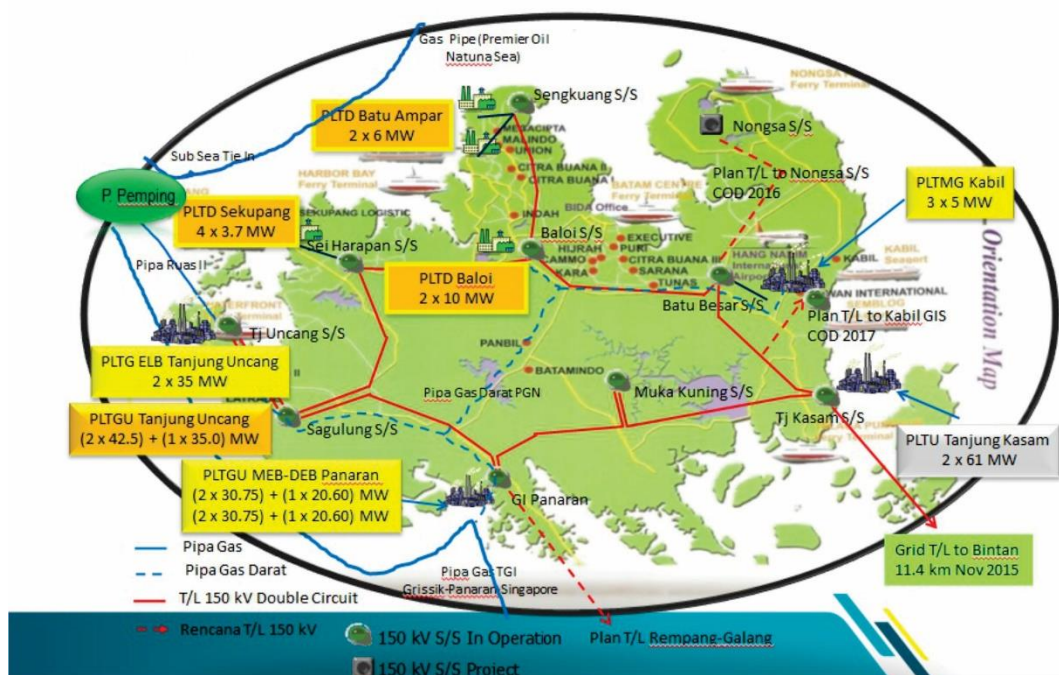
- COD tahun 2012
- Kapasitas 2 x 55 MW
- Kontribusi terhadap daya mampu pasok (MW) di PT PLN Batam sebesar 20 % dari total kebutuhan listrik Batam
- Kontribusi terhadap *fuel mix* di PT PLN Batam sebesar 32 %
- Kontribusi terhadap pasokan energi (MWH) di PT PLN Batam sebesar 32%

Terkait masalah non teknis didapat informasi keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak ideal. Dari 400-an karyawan yang ada, 100-an pekerja diantaranya merupakan tenaga kerja asing. Di *room control* saja keseluruhannya warga negara Tiongkok dan bahkan sudah tiga tahun bekerja, tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan, petunjuk apapun di sana juga berbahasa Tiongkok. Padahal, dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sudah dikatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia.

B. Pertemuan dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I, PT PGN, PT PLN (Persero), SKK Migas, BPH Migas, KKKS di Provinsi Kepulauan Riau mendapat informasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau, untuk daerah eks Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) pengelolaan ketenagalistrikan dari hulu hingga hilir di Batam dilakukan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam) selaku unit mandiri dengan status sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero). Sedangkan daerah Batam tetapi bukan eks OPDIPB dikelola oleh PT PLN, seperti daerah Pulau Buluh, Pulau Belakang Padang, Pulau Ngenang dan lain-lain.
2. Kelistrikan daerah Batam non eks Batam Rasio Pulau Buluh, Pulau Belakang Padang, Pulau Ngenang dan Bintan dibeli oleh PLN dari PLN Batam dengan harga Rp. 1300 / kWh dan dijual ke pelanggan sesuai tarif nasional Rp 1467,28 / kWh
3. Rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau saat ini sangat rendah yaitu 75.65% dan rasio desa berlistrik sebesar 78.8%. Sistem pembangkitan listrik di Kepulauan Riau, terutama di Batam sebagian besar menggunakan energi primer bahan bakar gas (PLTG) sisanya bahan bakar minyak (PLTD) dan batubara (PLTU). Penggunaan PLTD hanya dilakukan dalam kondisi *emergency*.

Sistem Kelistrikan Batam



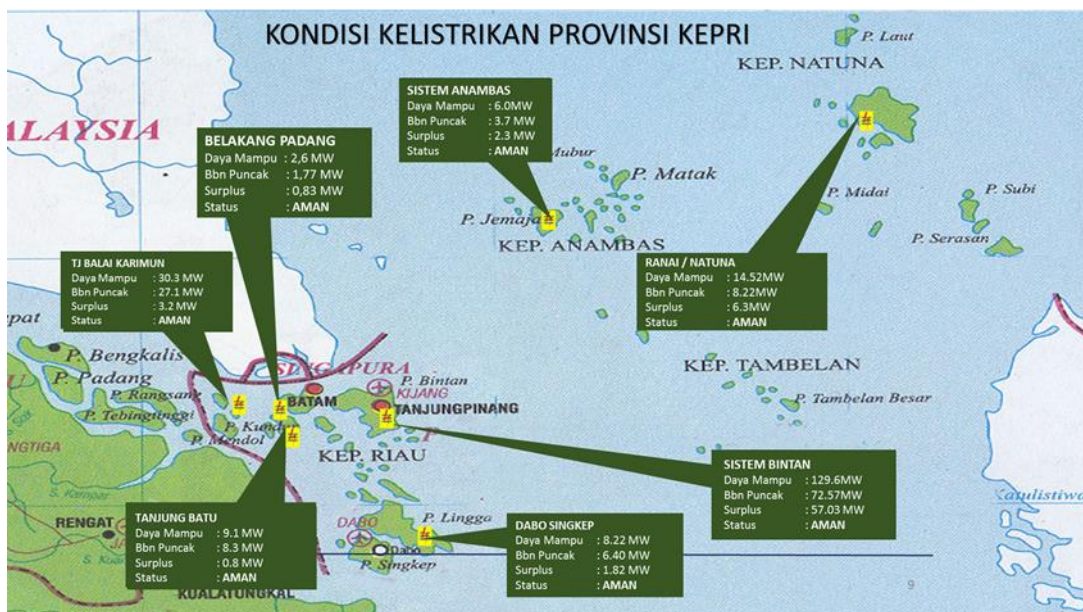
Overview Kelistrikan Batam

No	Unit Pembangkit	Type	Jumlah Unit	Total Daya Mampu (MW)
1	Batu Ampar 2	PLTD	2	12
2	Sekupang 2	PLTD	4	12
3	Baloi	PLTD	2	18
4	PLTMG Panaran	PLTMG	3	24
5	PLTGU Tg. Uncang	PLTGU	2	85
6	CCPLTGU Tg. Uncang	CC	1	40
7	Panaran 1	PLTG	2	61.4
8	CC Panaran 1	CC	1	20.6
9	Panaran 2	PLTGU	2	82
10	CC Panaran 2	CC	1	20.6
11	Kabil 1	PLTMG	3	17.4
12	Tanjung Kasam	PLTU	2	110
13	ELB	PLTGU	2	70
Total Pembangkit			27	573
Beban Puncak Tertinggi (2017)				416
Reserve Margin				157
Reserve Margin (%)				27%

4. Sistem kelistrikan Batam sudah interkoneksi 150 kV Batam – Bintan dan 20 kV Batam – Belakang Padang:

- Interconnection 150 kV Batam – Bintan
 - Interconnector : Overhead Transmission = 3 km, Submarine = 8.4 km
 - Transmission (onshore Bintan Island) : 83 km
- Submarine 20 kV to Belakang Padang Island

Kondisi Kelistrikan di Kepulauan Riau



5. Tahun ini PLN mengalami penurunan pertumbuhan *minus* 1,3% dibanding tahun-tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan 7-8%
6. Saat ini PLN mendapatkan gas dari Sumatera dengan harga yang cukup murah antara 5-6 USD/MMBTU dibandingkan dengan harga gas yang diterima di *plane gate* di seluruh Indonesia, akan tetapi harga tersebut kontraknya akan selesai pada tahun 2019, oleh karena itu, kontrak berikutnya apakah harganya akan tetap sama atau ada perubahan. Selaian itu, PLN juga dihadapkan dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan *opportunity margin* sekitar 2 Milyar perbulan pada setiap melemahnya nilai tukar rupiah sebesar 100 Rupiah
7. Kondisi wilayah usaha di Bintan:
 - Kondisi Bintan sudah surplus 57 MW (*reserve margin* 79% dari transfer kabel laut Batam)
 - Sudah ada Nota Kesepahaman Penyediaan Tenaga Listrik sebesar 40 MW dengan PT BIIE (Lobam) & 120 MW dengan PT BRC (Lagoi), saat ini PLN sudah melayani kedua Wilus tersebut dengan status pelanggan premium
 - Kondisi Beban saat ini masih rendah (di PT BRC 10.3 MVA & PT BIIE 8.6 MVA)
 - Untuk meningkatkan keandalan suplai ke kawasan Industri Lobam, PLN sudah merelokasi PLTMG 9 MW (PLN Batam) ke Lobam. Selain itu juga akan dibangun MPP 33 MW (2019)
8. Kondisi wilayah usaha di Karimun:
 - Infrastruktur jaringan 20 KV milik PLN tersedia hingga ke daerah Zona 1 dan Zona 2, dan konsumen di daerah tersebut sudah dilayani oleh PLN. Namun sejak Wilus Zona 1 dan Zona 2 aktif (2017), PLN berhenti untuk melayani konsumen pada daerah tersebut
 - Kondisi *eksisting* terdapat 1.800 plg di Zona 1, 14.000 plg di Zona 2, dan 25.693 plg di Wilus PLN, total 41.493 plg
 - Daftar tunggu total 968 calon pelanggan dengan total daya 1,42 MVA di Zona 1 dan Zona 2

- Terkait kondisi diatas :
 - PLN tidak menambah pelanggan di Zona 1 dan Zona 2
 - PLN siap untuk melistriki kedua Zona tersebut jika ada izin dan permintaan dari pemerintah setempat
 - Apabila PLN diminta melistriki daftar tunggu maka PLN WRKR meminta agar dapat melistriki juga industri yang ada pada Zona 1 dan 2
9. Penyaluran BBM khusus penugasan (premium) dan BBM Tertentu (solar) yang dilaksanakan PT Pertamina tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun demikian kuota BBM khusus penugasan (premium) dan BBM Tertentu (solar) yang diberikan BPH Migas setiap tahunnya tidak dapat diserap secara optimal oleh masyarakat atau justru karena distribusi premium dibatasi oleh PT Pertamina.
 10. Untuk penyaluran LPG PSO tahun 2018 mendapatkan kuota sebesar 45.118, mengalami kenaikan 3.0% dari realisasi tahun 2017 sebesar 43.844
 11. Program BBM 1 harga Di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 PT Pertamina telah merealisasikan di Desa Sepempang, Desa Sabang Mawang, Air Payang Kabupaten Natuna, Desa Jemaja Pulau Letung, Anambas, Pulau Tambelan, Serasan Kabupaten Bintan.
 12. Segmen PLN trennya menurun rata-rata 11,3% seiring program konversi energi PLN dari BBM ke gas/batubara
 13. Penurunan realisasi segmen NPSO-NPLN-NTNI terutama terjadi di *Direct Key Account* sebesar rata-rata 9,9%/tahun, yang ditutupi dengan peningkatan realisasi *Direct Non Key Account, Agent, dan Subsidiaries* (kumulatif naik rata-rata 13,4%/tahun).
 14. PT PGN mengelola Gas di Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran gas	68 BBTUD
Jumlah pelanggan	4804 pelanggan industri, komersial, dan rumah tangga
Penugasan jarga	4001 SRT pada Tahun Anggaran 2016

Harga gas	Rp. 2.838 – 3.264
Panjang pipa distribusi	218 KM
Sumber pasokan gas	Sumatera Selatan
Infrastyruktur gas non pipa	1 (satu) unit SPBG

15. Sejak tahun 2004 PT PGN telah menyediakan gas untuk sektor kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 300 MW dan distribusi sebesar 49 BBTUD untuk kelistrikan PLN Batam, IPP Batam (Dalle Energi Batam, Indo Mitra Powr, dan Energi Listrik Batam), kelistrikan Pulau Pulau Pemping dan Karimuan), dan kelistrikan industri (Batamindo Investama Cakrawala, Panbil Utilitas Sentosa, dan Tunas Energi Indonesia)
16. Sejak tahun 2016 PGN mengelola dan mengoperasikan jaringan gas rumah tangga di kota Batam dengan menggunakan anggaran PGN maupun berdasarkan penugasan Pemerintah melalui pendanaan APBN. Saat ini yang sudah tersambung aktif sebanyak 4681 pelanggan dengan realisasi penyaluran tahun 2017 sebesar 342 Ribu M3.

1 Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dewan Riset Daerah, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ristek dan Dikti, LPNK Ristek, PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I, PT PLN (Persero), SKK Migas, BPH Migas, KKKS dan perusahaan tambang di Provinsi Kepulauan Riau mendapat informasi sebagai berikut:

1. Secara umum isu bidang ESDM yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau adalah terkait permasalahan pemenuhan daya listrik, pengelolaan lingkungan tambang, tambang tanpa izin, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), belum ada penetapan cekung air tanah. Sedangkan isu bidang lingkungan hidup terkait permasalahan pencemaran limbah industri, *sludge oil*, dan sampah, pengawasan AMDAL, UKL, UPL, konversi kawasan lindung, pencemara, air dan udara, konservasi lahan dan *catchment area*

2. Potensi Gas Bumi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 51,46 TSCF dan potensi minyak bumi sebesar 383 MMSTB. Adapun reencana pemanfaatan gas dari WNTS yaitu *tie in* pipa WNTS ke Pulau Pemping dan Pulau Batam.
3. Progres *participating interes* (PI) dari Northwest Natuna saat ini masih proses penyiapan berkas dan kelengkapan dokumen pendukung oleh BUMD Provinsi Kepulauan Riau PT Pembangunan Kepri
4. Sistem Kelistrikan Provinsi Kepulauan Riau saat ini Isolated / tidak terintegrasi dengan rincian sebagai berikut:

Sistem Kelistrikan	Isolated / tidak terintegrasi
Rasio Elektrifikasi	89,14 %
Rasio Desa Berlistrik	74,6 %
Rasio Pulau Berlistrik	35% dari pulau berpenghuni
Pengembangan Kelistrikan	Penggunaan CNG dan LNG untuk pembangkit Interkoneksi kabel laut

Sistem Kelistrikan	Daya Mampu (MW)	Beban Puncak (MW)
Batam	410	340
Belakang Padang	Terhubung dengan Batam	1,25
Karimun	25	24
Tg. Batu	9	6
Tg. Uban	13,13	8,05
Tg. Pinang	150	63,93
Dabo Singkep	7	5,1
Tarempa	6	2
Ranai	9	5,1

5. Masih terdapat pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau, seperti Pulau Buluh, Pulau Penyengat, dan lain-lain yang kelistrikannya beroperasi hanya 12 jam dengan menggunakan PLTD, hal ini yang menyebabkan rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau masih rendah.

6. Saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi permasalahan lingkungan hidup, terutama terkait dengan tumpahan limbah minyak di laut di wilayah perairan dan pesisir utara Pulau Bintan dan Pulau Batam yang rutin terjadi pada bulan Oktober – Februari setiap tahunnya. Saat ini langkah penanganan yang sudah dilakukan adalah:
- Pengangkutan limbah minyak ke perusahaan pengumpul/pengolah limbah B3:
 - 200 drum oleh KLHK
 - 30 drum oleh Provinsi
 - Inspeksi terhadap perusahaan pemegang izin tank cleaning
 - Pembentukan Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (dalam proses penetapan SK)
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap optimalisasi pengawasan dan langkah taktis dari TNI AL, Kemenhub, KLHK dan LAPAN.
6. Target kinerja Provinsi Kepulauan Riau bidang ESDM dari tahun 2016 sampai 2021 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	2016	2021
1	Pemanfaatan Air Tanah Sesuai Aturan	13 %	100 %
2	Penyediaan Informasi Sumber Mineral dan Air Tanah	-	7 kab/kota
3	Pelayanan IUP Sesuai SOP	65 %	95 %
4	Kepatuhan Pemegang IUP Terhadap Aturan	65 %	95 %
5	Kontribusi Sektor Tambang Bagi Pendapatan Daerah	0,84 %	1,50 %
6	Rasio Elektrifikasi	89,14 %	93,50 %
7	Rasio Desa Berlistri	74,6 %	100 %
8	Kontribusi EBT dalam Bauran Energi	0,0005 %	0,001 %

8. Target kinerja Provinsi Kepulauan Riau bidang lingkungan hidup dari tahun 2016 sampai 2021 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	2016	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidu	66,97	69,80
2	Kualitas Air Waduk Sesuai Baku Mutu	63,64 %	100 %
3	Kualitas Air Laut Kab/Kota Sesuai Baku Mutu	57,14 %	100 %
4	Pengelolaan Limbah B3 Sesuai Standar	19 %	100 %
5	Kualitas Udara Ambien Kab/Kota Sesuai Baku Mutu	57,14 %	100 %
6	Kab/Kota Menjadi Nominasi Adipura	71,43 %	100 %
7	Sekolah Adiwiyata Provinsi/Nasiona	10 sekolah	154 sekolah
8	Rehabilitasi Mangrove	5 Ha	28 Ha
9	Ketersediaan Data dan Informasi LH Daerah	100 %	100 %

9. Realisasi pemanfaatan gas untuk Kepulauan Riau berdasarkan rata-rata realisasi bulan Januari – Februari 2018 adalah sebagai berikut:

Pembeli	Sumber Gas	DCQ (BBTUD)	Jangka Waktu	Harga Gas 2018 (US\$/MMBTU)	Peruntukan	Realisasi Serapan Gas Thn 2018	Keterangan	
1	PGN Batam II	COPI Blok Corridor	12	s/d 2019	2,57	Kelistrikan	13.09	-
2	PGN Batam I	COPI Blok Corridor	50	s/d 2019	• 2,60 (<27,27 BBTUD) • 3,50 (27,27-50 BBTUD)	Industi dan Kelistrikan	47.31	-
3	BUMD Pemkot Batam	JOB Talisman Jambi Merang	10	s/d 2019	6,87	Industi dan Kelistrikan	5.92	Penyerapan PLN sebagai salah satu pengguna gas dari PT Pembangunan Kota Batam (BUMD) turun
4	PLN Batam	Petrochina Jabung	14-17	s/d 2023	6.67	Kelistrikan	8.83	Belum siapnya fasilitas Pembeli dan <i>demand</i> di Batam lebih

								rendah dibandingkan dengan proyeksi <i>demand</i> .
		JUMLAH	85-88					
1	PLN Batam (GSA#3)	Lap. Gajah Baru - PremierOil	20	Plateau 12 Tahun	5.91	Kelistrikan	Belum <i>on-stream</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri ESDM telah menetapkan Alokasi Gas. • Gas baru dapat mengalir setelah pembangunan an pipa WNTS - Pemping oleh PGN terealisasi
2	Universal Batam Energy (UBE) (GSA#4)	Lap. Gajah Baru - PremierOil	20	Plateau 12 Tahun	5.91	Kelistrikan	Belum <i>on-stream</i>	
		JUMLAH	20-40					
TOTAL			105 -128					

10. Masih ditemukan perbedaan rasio elektrifikasi antara data ESDM dengan PLN karena perbedaan definisi dan standar acuan yang digunakan sehingga diperlukan adanya sinkronisasi data rasio elektrifikasi secara nasional antara Kementerian ESDM dan PLN.
11. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai sumber dan potensi energi yang cukup beragam, yaitu potensi energi terbarukan, diantaranya yaitu panas bumi, tenaga angin, air/sungai, PLTMH, PLTU, dan tenaga matahari (PLTS). Namun demikian, potensi-potensi tersebut belum dapat dikembangkan dengan maksimal karena berbagai hambatan termasuk kondisi geografis dan anggaran, serta yang utama adalah kebijakan dan dorongan dari pemerintah pusat.
12. Potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau yang cukup banyak dan beragam perlu dilakukan inventarisasi dan pendataan dengan lebih detail untuk menjadi bahan perencanaan dalam pengembangannya, serta pengalokasian anggaran pembangunan termasuk sebagai upaya untuk menarik bagi investor atau mitra pembangunan agar terlibat aktif dalam peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau

13. Penyaluran BBM khusus penugasan (premium) dan BBM Tertentu (solar) yang dilaksanakan PT Pertamina tidak mengalami hambatan yang berarti. Namun demikian kuota BBM khusus penugasan (premium) dan BBM Tertentu (solar) yang diberikan BPH Migas setiap tahunnya tidak dapat diserap secara optimal oleh masyarakat atau justru karena distribusi premium dibatasi oleh PT Pertamina.
14. PT PGN mendapatkan penugasan dari Kementerian ESDM untuk membangun pipa dari pipa *West Natuna Transportation System* (WNTS) ke Pulau Pemping, di Kepulauan Riau sejak 2016 lalu. Penugasan ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 6105 K/12/MEM/2016. Melalui keputusan ini juga, pembangunan Kementerian ESDM menugaskan PGN membangun pipa tersebut dengan anggaran internal. Namun tetapi sampai hari ini proyek tersebut masih belum berjalan karena karena sampai saat ini belum ada *demand* atau pembeli gas selain dari PLN.
15. LIPI telah melakukan kerjasama dengan Kabupaten Lingga untuk penggunaan Pupuk Organik Hayati guna mengurangi bahaya pestisida, selain itu LIPI juga bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam untuk merealisasikan proyek kebun raya yang akan dikembangkan di Kota Batam, dan LIPI selama ini telah melibatkan perguruan tinggi di Kepulauan Riau guna melakukan penelitian dalam rangka perbaikan lingkungan dan terumbu karang terutama kawasan pesisir Natuna.
16. BPPT telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Anambas dan Natuna, bahkan dengan Pemerintah Natuna BPPT telah melakukan tukar menukar aset guna optimalisasi diseminasi hasil-hasil penelitian.

C. Peninjauan Jaringan gas di Perumahan Sentosa Perdana, Batuaji, Batam mendapat informasi sebagai berikut:

1. Total pipa yang dibangun untuk mengalirkan gas bumi ke 4.003 rumah tangga di Batam mencapai lebih dari 55 Km yang tersebar di 16

perumahan. Dibangun sejak 2016, dana pembangunan proyek sambungan gas rumah tangga ini dibiayai dari APBN.

2. Hingga saat ini, pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN di Batam sepanjang 223,57 Km. Selain jargas, PGN juga telah membangun pipa distribusi di kawasan Nagoya sepanjang 18,3 Km.
3. Di Batam, PGN sampai saat ini telah memasok gas bumi ke 4.809 pelanggan dengan rincian, 43 industri besar, 65 pelanggan komersial seperti restoran hingga hotel, serta 4701 rumah tangga.

BAGIAN II

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilakukan ini, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Terdapat masalah non teknis PLN terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak ideal. Bahkan terdapat TKA sudah tiga tahun bekerja, tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal ini menyalahi aturan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sudah dikatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia.
2. Rasio elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau secara umum masih sangat rendah, Untuk itu, perlu upaya maksimal dan terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan kelistrikan di Kepulauan Riau, termasuk dengan pengalokasian anggaran yang lebih besar dalam APBN.
3. Masih ditemukan perbedaan rasio elektrifikasi antara data ESDM dengan PT PLN karena perbedaan definisi dan standar acuan yang digunakan. Untuk itu Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk membahas sinkronisasi data rasio elektrifikasi secara nasional.
4. Konsumsi BBM di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan, kuota BBM khusus penugasan (premium) dan BBM Tertentu (solar) yang diberikan BPH Migas setiap tahunnya tidak dapat diserap secara optimal untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan BPH Migas dan PT Pertamina untuk merumuskan kembali kebijakan kuota penyaluran BBM.
5. PT PLN mendapatkan gas dengan harga yang cukup murah antara 5-6 USD/MMBTU akan tetapi kontraknya akan selesai pada tahun 2019, oleh karena itu kontrak berikutnya apakah harganya akan tetap sama atau ada perubahan. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan para mitra terkait.

6. Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi permasalahan lingkungan hidup, terutama terkait dengan tumpahan limbah minyak di laut di wilayah perairan dan pesisir utara Pulau Bintan dan Pulau Batam yang rutin terjadi pada bulan Oktober–Februari setiap tahunnya. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan KLH dan Lapan untuk mendapatkan citra satelit dan memberikan solusi penanganan atas permasalahan tersebut.

BAGIAN II

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Tim Kunjungan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya fungsi pengawasan.

Jakarta, 3 Mei 2018

Ketua Tim Kunker Komisi VII DPR RI
ke Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si